



RENJA

PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Renja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta RPD Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 sebagai penjabaran RPD Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program,



sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 Satpol PP disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Pangkalpinang, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021).....	 6
2.1 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	 10
3.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	10
 BAB IV PENUTUP.....	 27

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 2.1 Realisasi Indikator Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II 2024.....	7
Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan, Pagu Total OPD Perubahan Renja 2024 dengan Renja/APBD 2024.....	11
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	12



DAFTAR LAMPIRAN

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Satpol PP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan
Tahun 2024 (sd. Triwulan II)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Renja (Rencana Kerja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun.

Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai salah satu SKPD Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka proses penyusunan perubahan Renja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dilakukan setelah perangkat daerah menerima Surat Edaran Kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan perubahan rencana kerja (renja) ini dilakukan atas hasil evaluasi realisasi outcome dan output kegiatan satuan polisi pamong praja dan prediksi pencapaiannya sampai dengan tahun anggaran. Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD ini diperlukan keterkaitan dokumen perencanaan lainnya, seperti dokumen Renstra SKPD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJD Daerah, RPJMD Daerah, selanjutnya perubahan Renja perangkat daerah di implementasi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan perangkat daerah sebagai penjabaran perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, serta tujuan dan sasaran Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertera dalam Renstra SKPD Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra SKPD dan pedoman bagi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024;
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bab I Pendahuluan meliputi, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, meliputi evaluasi kinerja program dan kegiatan. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi rencana perubahan program dan kegiatan tahun 2024. Bab IV Penutup.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUNBERKENAAN (2024)

2.1 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Seperti yang terlihat dalam tabel lampiran dokumen perencanaan perubahan renja 2024 ini Satpol PP provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 3 (tiga) program dan

28 (delapan belas) kegiatan. Dari table itu dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi 3 (tiga) program kegiatan, 13 kegiatan serta 46 sub kegiatan sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target Renja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan target yang belum tercapai pada triwulan II ini adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran serta Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ketidaktercapaian program dan kegiatan salah satu nya disebabkan pemangkasan Pagu anggaran yang diakibat kan karena realisasi 2 minggu pertama juli ini mengalami perlambatan PAD yg lebih besar lagi. Sampai bulan Juli baru sekitar 12%.. Dari tabel itu juga dapat dilihat terdapat 29 (delapan) kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II, dan terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang belum dilaksanakan,



Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sd. triwulan ke-II sebesar Rp. 10.541.345.715 atau 43,71persen. Dari tabel itu dapat dilihat terdapat realisasi keuangan per kegiatan bervariasi ada tinggi, sedang dan ada juga yang rendah, bahkan masih ada 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang realisasi keuangannya masih 0 (nol) persen.

Tabel 2.1
Realiasi Keuangan sampai dengan Triwulan II
2024 Menurut Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi sd T-2	%	Ket
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.211.463.567	7.343.775.021	51,68%	
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	288.000.300	41.666.573	14,47	3 sub kegiatan
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	11.535.029.667	6.892.023.581	59,75	4 sub kegiatan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000			1 sub kegiatan
4	Administrasi Kepegawaian	66.000.000	-	0	1 sub kegiatan
5.	Administrasi umum perangkat daerah	273.223.000	119.693.336	43,81	8 sub kegiatan
6.	Pengadaan Barang	736.591.400	-	0,00	3 sub



No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi sd T-2	%	Ket
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				kegiatan
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	646.141.000	217.716.337	33,69	4 sub kegiatan
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	662.978.200	72.675.194	10,96	3 sub kegiatan
B	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	8.474.392.620	2.777.745.348	32,78	
9.	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8.074.406.900	2.757.713.888	34,15	8 sub kegiatan
10.	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	304.985.900	20.031.460	6,57	1 sub kegiatan
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provins	94.999.820	-	0,00	2 sub kegiatan
C	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.429.421.692	419.825.346	29,37	
11.	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	1.368.421.812	397.116.382	29,02	7 sub kegiatan



No.	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi sd T-2	%	Ket
112.	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	60.999.880	22.708.964	37,23	1 sub kegiatan
JUMLAH		24.115.227.879	10.541.345.715,-	43,71	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 3.1 dibawah ini merupakan gambaran umum perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan jumlah pagu total OPD dalam Perubahan Renja 2024 dibandingkan dengan Renja/APBD 2023. Terlihat dari tabel dimaksud jumlah program dan kegiatan Satpol PP tidak berubah jumlahnya, namun perubahan terjadi pada jumlah sub kegiatan yang awalnya 46 sub kegiatan, berubah menjadi 44 sub kegiatan, hal ini terjadi dikarenakan efektifitas dan efisiensi anggaran, demikian juga perubahan terjadi seiring sejalan karena terjadinya Recofusing anggaran pada bulan Juli 2024 dari pagu anggaran induk sebesar **Rp24.115.227.879 menjadi Rp. 23.297.200.427**

**Tabel 3.1**

Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Pagu Total OPD Perubahan Renja 2024 dengan Renja/APBD 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Jumlah Kegiatan/Pagu Total OPD	Renja/APBD 2024	Perubahan Renja 2024	+/-
1	Jumlah Program	3	3	-
2	Jumlah Kegiatan	13	12	-
3	Jumlah Sub Kegiatan	46	39	(1)
4	Jumlah Indikator Sub Kegiatan	46	39	(2)
5	Jumlah Pagu Total OPD	24.115.227.879	23.297.200.427	818.077452

Perubahan Renja 2024 Satpol PP secara lengkap disajikan dalam tabel 3.2 Perubahan atau pergeseran pagu anggaran, mempertimbangkan ketersediaan anggaran, menganalisis dan mempertimbangkan berbagai hal diantaranya:

1. Melakukan rasionalisasi belanja kegiatan terhadap kegiatan- kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
2. Melakukan rasionalisasi belanja terhadap belanja yang telah selesai dilaksanakan dan tidak dibelanjakan.
3. Memperhitungkan ulang perkiraan realisasi output dari masing-masing kegiatan.
4. Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Tanggal 28 Juli 2024 dan surat edaran BAPPEDA Nomor 050/0664/BAPPEDA-II, Hal Penyesuaian Pagu Rancangan Perubahan Renja PD tahun 2024 pasca rapat pimpinan

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat				24.115.227.879				
1	05	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	73 nilai indeks Kepuasan Pelayanan internal	Pangkalpinang	73 persen	287.998.500	APBD	-	75 persen	
					80 nilai sikap perangkat daerah (SATpolPP)	Pangkalpinang	80 persen	14.186.558.715	DAU dan APBD	-	73 persen	
								13.704.045.803	DAU dan APBD			
1	05	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Pangkalpinang	7 dokumen	280.029.400	APBD	-	7 dokumen	380.000.000
1	05	01	1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	Pangkalpinang	2 dokumen	128.000.600	APBD	-	2 dokumen	170.000.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jml Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 kabupaten /kota	33 Dokumen	63.999.700	APBD		42 dokumen	90.000.000
1	05	01	1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (Dalev, LKPJ, LAKIP, LPPD dan Data Sektoral)	Pangkalpinang	7 laporan	96.000.000	APBD	Penambahan output data sektoral	5 laporan	120.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survei kepuasan pelayanan keuangan	Pangkalpinang	82,95 persen	12.667.056.115	DAU	-	92 persen	11.731.50.000
1	05	01	1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Pangkalpinang	76 orang	12.616.556.115	DAU		78 orang	1.106.930.648honoraria
1	05	01	1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD	Pangkalpinang	700 dokumen	6.499.600	APBD		60 dokumen	6.500.000
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		0	0	APBD		2 dokumen	5.000.000
1	05	01	1.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD	Pangkalpinang	13 laporan	44.000.400	APBD		13 Laporan	50.000.000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian			681.936.840				207.500.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				APBD		2 unit	10.000.000
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah dokumen verifikasi	0	0	APBD		0	0



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kelengkapan	keuangan SKPD						
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD	5 Orang	40.000.000	APBD		100.000.000	
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survei kepuasan pelayanan umum	Pangkalpinang	73 persen	16.000.000	APBD	-	73 persen	16.000.000
1	05	01	1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis)	Pangkalpinang	12 paket	14960300	APBD	'Penambahan bohlam lampu	1 paket	15.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0				3.000.000
1	05	01	1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (unit)	Pangkalpinang	1 paket	19496200	APBD	-	1 paket	19.500.000
1	05	01	1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan dokumen (eksemplar)	Pangkalpinang	1 paket	17794400	APBD	-	1 paket	17.800.000
1	05	01	1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Pangkalpinang	1 paket	2000000	APBD	-	1 paket	18.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					(eksemplar)							
1	05	01	1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah alat tulis kantor (jenis)	Pangkalpinang	4 Paket	80997100	APBD	penambahan ATK dan alat kebersihan	4 Paket	81.000.000
1	05	01	1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan dan minuman tamu yang tersedia (pax)	Pangkalpinang	15 Laporan	14.000.000	APBD		10 Laporan	14.000.000
1	05	01	1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Pangkalpinang	60 Laporan	105.000.000	APBD	penambahan SPPD untuk rutin	100 kali	275.000.000
1	05	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah urusan penunjang pemda yang disediakan (jenis)	Pangkalpinang	1 dokumen	3.798.000	APBD	-	1 dokumen	3.798.000
1	05	01	1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang	0	0	APBD	-	12 laporan	3.798.000
1	05	01	1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkalpinang	12 laporan	179968000	APBD	-	36 bulan	180.000.000
1	05	01	1.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	13 laporan	452.400.000	APBD	-	3 orang	452.400.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)	Pangkalpinang	16 unit	238.580.000	APBD	-	19 unit	238.580.000
1	05	01	1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pangkalpinang	12 unit	384408200	APBD	Kekurangan pajak kendaraan mobil dinas pada SATPOLPP, suku cadang rehab kaca HIS. Jasa servis mobil dalmas roda enam) pergeseran dari bidang tibum, penambahan 6 pajak mobil	12 unit	153.580.000
1	05	01	1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						1 unit	2.000.000
1	05	01	1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkalpinang	4 unit	39.990.000	APBD	-	4 unit	39.990.000
1	05	01	1.09.10	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Pangkalpinang	0 unit	0	APBD	rehab kantor	5 unit	85.000.000

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					tasi							
1	0	0	1.09	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			2 unit	597.078.000			2 unit	597.078.000
1	0	0	1.09.0	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	2 unit	17.921.800	APBD		2 unit	132.078.000
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 unit	-	APBD	Penambahan jasa perencana dan jasa pengawas		375.569.520
1	0	0	1.09.0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	2 unit	121.591.600	APBD	-	2 unit	90.000.000
1	0	0		Program Peningkatan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Provinsi Kep. Babel	100 %	7.617.643.620	APBD	-	31,14 persen	28.053.400k-
					Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Provinsi Kep. Babel	31,14 persen		APBD	-	100 persen	-



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	Provinsi Kep. Babel	61,1 persen		APBD	-	39,3 persen	-
					Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Pangkalpinang	30,3 persen		APBD	-	81,1 persen	-
								7.617.643.620				9.756.600.000
1	0	0	1.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Provinsi Kep. Babel	60 orang j 350 kasus 12 kali 200 orang	7.236.157.900	APBD		200 orang 604 kali 12 kali 60 orang	9.106.500.000
1	05	02	1.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Provinsi Kep. Babel	350 kasus	6601138500	APBD	Pergeseran untu operasional kantoe dalam rangka menunjang Kegiatan PEMILU dan kegiatan GULE KABUNG	564 kasus	7.581.500.000
1	05	02	1.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan	Provinsi Kep. Babel	28 dokumen	69993600	APBD		28 laporan	70.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan							
				Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Pangkalpinang	1 dokumen	127998700	127998700		1 dokumen	170.000.000
				Sub Kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketertiban umum	Pangkalpinang	1 laporan	217995600	APBD		1 laporan	250.000.000
1	05	02	1.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Pangkalpinang	190 orang	177031900	APBD		190 orang	225.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM	dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya							
1	05	02	1.01.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Pangkalpinang	0 unit	0	APBD		10 unit	605.000.000
				Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan		1 Laporan	11.979.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan		1 laporan	20.000.000	APBD		3 laporan	30.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					penindakan							
1	0	0	1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparat dan badan usaha	Provinsi Kep. Babel	35 kali	304.985.900	APBD	-	52 kali	465.000.000
					Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggaran perda dan pergub	Provinsi Kep. Babel	8 kali					
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1 laporan	93999600			1 laporan	140.000.000
1	05	02	1.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	Provinsi Kep. Babel	1 Laporan	105986700	APBD	'perubahan rincian, penambahan perjalanan dinas	1 laporan	150.000.000
1	05	02	.1.02.009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Provinsi Kep. Babel	1 dokumen	104999600	APBD		1 dokumen	175.000.000
1	05	02	1.02.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan pergub	Provinsi Kep. Babel	1 laporan	76499820	APBD	'penambahan perjalanan dinas,	1 laporan	18.500.000p



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										honorarium tim kegiatan, pengadaan PolPP Line (5)gulung		
					Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran perda dan pergub	Provinsi Kep. Babel	50 orang			'perubahan rincian	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kep. Babel	1 laporan	76499820	APBD		1 laporan	76.499.820
1	0	0		Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Provinsi Kep. Babel	64 %	1.204.999.592	-	-	64	1.420.000.000
1	0	0	1.01	kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	Provinsi Kep. Babel	60 orang	1.143.999.712	-	-	1 dokumen	126.446.400



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jumlah dokumen kerjasama antar daerah/antar lembaga Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Pangkalpinang	1 dokumen		APBD	-	20 orang	1.110.000.000
					Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	4 kali	1 dokumen				-	
					Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	4 kali	26 unit				-	
1	05	04	1.01.03	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Provinsi Kep. Babel	7 dokumen	89993500	APBD		1 laporan	90.000.000
				Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota diri	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kep. Babel	12 laporan	788000000			12 laporan	960.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



				Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan,	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar	Provinsi Kep. Babel		62324712			7 dokumen	100.000.000
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				penanggulangan, penyelamatan	wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan							
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal						1 dokumen	90.000.000
1	05	04	1.01.05	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Pangkalpin ang	5 unit	77235100	APBD	Pembelian selang	15 unit	134.450.000



				Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi	60 orang	126446400			60 orang	200.000.000
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	--	--	----------	-------------



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata-tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan Kabupaten/kota							
	kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				60999880				
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			60999880			1 laporan	85.000.000
TOTAL (PROGRAM I+II+III)					23.297.200.427				25.829.301.204



BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perubahan 2024 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Perubahan. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala SKPD mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



YAMOWATA HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003